

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrument untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik.¹

Anggaran adalah suatu pernyataan kondisi keuangan yang direncanakan atau diperkirakan pemerintah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun) berdasarkan perkiraan pengeluaran yang dibelanjakan sub divisi utama pemerintah selama periode tertentu. Pada dasarnya struktur anggaran negara ada dua hal, yaitu struktur penerimaan (pendapatan) dan struktur pengeluaran. Struktur penerimaan meliputi pos-pos penerimaan yang bersifat *fixed* dan *non fixed* (Insidental)². Jadi, yang dimaksud dengan APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai

¹ Suminto, *Pengelolaan APBN dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*, (Ditjen Anggaran, Depkeu, 2004) h. 1

² Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Hutang, Membedah APBN 2005-2010 vs APBN Khilafah* (Bogor: Al Azhar Press, 2010), h.49

penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ditetapkan dengan undang-undang. Tahun anggaran APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam menyusun APBN, perencanaan alokasi belanja negara diarahkan untuk mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi agar dapat digunakan secara produktif, yaitu terjadinya relokasi faktor-faktor produksi yang akan digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi khususnya dalam stabilitas perekonomian Nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas belanja negara dengan mengutamakan belanja modal sebagai pendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan, mengefisienkan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, dan menghindari peningkatan pengeluaran wajib. Belanja modal difokuskan untuk mendukung program infrastruktur, mendukung target pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan kesejahteraan rakyat, infrastruktur pertanian, dan infrastruktur energi serta komunikasi.

Sebelum tahun 1999, prinsip APBN adalah anggaran berimbang dinamis, dimana jumlah penerimaan negara selalu sama dengan pengeluaran Negara, dan jumlahnya diupayakan meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1999 hingga

sekarang, prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu, format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account. Perbedaan antara prinsip anggaran surplus/defisit dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa : 1) Pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan, dan 2) Defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri (bersih).

Apabila belanja lebih kecil daripada anggaran, disebut sebagai anggaran surplus. Sebaliknya, apabila anggaran lebih kecil daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih besar daripada anggaran, disebut anggaran defisit. Masing-masing kebijakan anggaran mempunyai kecenderungan tersendiri. Pada sistem anggaran berimbang misalnya, perekonomian cenderung berjalan stabil jika dibandingkan dengan kebijakan anggaran defisit dan surplus.

Tabel 2.1
Ringkasan APBN
Tahun 2006-2011
(Angka dalam Miliar Rupiah)

Keterangan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP
A. Pendapatan Negara dan Hibah	637.987,2	707.806,2	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.169.914,6
I. Penerimaan dalam Negeri	636.153,1	706.108,3	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.165.252,5
1. Penerimaan Perpajakan	409.203,0	490.988,6	658.700,8	619.922,2	723.3026,6	878.685,5
a. Pajak dalam negeri	395.971,5	470.051,8	622.358,7	601.251,8	694.392,1	831.745,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	13.231,5	20.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	46.939,9
2. Penerimaan Negara bukan Pajak	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	286.567,3
II. Hibah	1.834,1	1.697,8	2.304,0	1.666,6	3.023,0	4.662,1
B. Belanja Negara	667.128,7	757.649,1	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.320.751,3
I. Belanja Pemerintah Pusat	440.032,0	504.623,3	693.355,9	628.812,4	697.406,4	908.243,4
1. K/L	216.094,7	225.014,2	262.003,3	306.999,5	332.920,2	461.508,0
2. Non K/L	223.937,3	279.609,1	431.352,7	321.812,9	364.486,2	446.735,4
II. Transfer ke Daerah	226.179,9	253.263,2	292.433,5	308.585,2	344.727,6	412.507,9
1. Dana Perimbangan	222.130,6	243.967,2	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.538,6
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	4.049,3	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,2	64.969,3
III. Suspen	916,8	(236,5)	(58,7)	(15,6)	(16,8)	0,0
C. Keseimbangan Primer	49.941,1	29.962,7	84.308,5	5.163,2	41.537,5	(44.252,9)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)	(29.141,5)	(49.843,7)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(150.836,7)

% Terhadap PDB	(0,9)	(1,3)	(0,1)	(1,6)	(0,7)	(2,1)
E. Pembiayaan	29.415,6	42.456,5	84.071,7	112.583,2	91.552,0	150.836,7
I. Pembiayaan dalam Negeri	55.982,1	69.032,3	102.477,6	128.133,0	96.118,5	153.613,3
II. Pembiayaan Luar Negeri	(26.566,5)	(26.575,8)	(18.805,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(2.776,6)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	274,1	(7.387,1)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	-

Sumber: Departemen Keuangan RI³

1. Anggaran Pendapatan Indonesia

Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Di Indonesia pendapatan diperoleh dari: *Pertama*, penerimaan perpajakan yang meliputi pajak dalam Negeri yaitu pajak penghasilan (PPH Migas dan PPH Nonmigas), pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan Bangunan, BPHTB dan Cukai. Pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan Bea Keluar. *Kedua* penerimaan negara bukan pajak yang meliputi penerimaan SDA (migas, minyak bumi dan gas alam), nonmigas (pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan pertambangan panas bumi), bagian laba BUMN, PNPB lainnya dan pendapatan BLU.⁴ Adapun data perkembangan pendapatan Negara tahun 200-2011 sebagai berikut:

³http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2012_rev1.pdf | Kamis, Tanggal 11 Juli 2013

⁴http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2012_rev1.pdf | Kamis, Tanggal 11 Juli 2013

Tabel 2.2
Data Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2006 – 2011
(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P
I. Penerimaan dalam negeri	636.153,1	706.108,4	979.305,4	847.906,6	992.248,5	1.292052,6
1. Penerimaan Perpajakan	409.203,0	490.988,7	658.700,8	619.922,2	723.306,7	1.019.332,4
a. Pajak dalam Negeri	395.971,5	470.051,9	622.358,7	601.251,8	694.392,1	976.898,8
i. Pajak Penghasilan	208.833,1	238.430,9	327.497,7	317.615,0	357.045,5	512.834,5
1. PPh Migas	43.187,9	44.000,5	77.018,9	50.043,7	58.872,7	58.665,8
2. PPh Nonmigas	165.645,2	194.430,4	250.478,8	267.571,3	298.172,8	454.168,7
ii. Pajak Pertambahan Nilai	123.035,9	154.526,8	209.647,4	193.067,5	230.604,9	350.342,2
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	20.858,5	23.723,5	25.354,3	24.270,2	28.580,6	35.646,9
iv. BPHTB	3.184,5	5.953,4	5.573,1	6.464,5	8.026,4	-
v. Cukai	37.772,1	44.679,5	51.251,8	56.718,5	66.165,9	72.443,1
vi. Pajak Lainnya	2.287,4	2.737,7	3.034,4	3.116,0	3.968,8	5.632,0
b. Pajak Perdagangan Internasional	13.231,5	30.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	42.433,6
i. Bea Masuk	12.140,4	16.699,4	22.763,8	18.105,5	20.016,8	23.534,6
ii. Bea Keluar	1.091,1	4.237,4	13.578,3	565,0	8.897,7	18.899,0
2. Penerimaan Negara bukan Pajak	226.950,1	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	272.720,2
a. Penerimaan SDA	167.473,8	132.892,6	224.463,0	138.959,2	168.825,4	172.870,8
i. Migas	158.086,1	124.783,7	211.617,0	125.752,0	152.733,2	156.010,0
1. Minyak Bumi	125.145,4	93.604,5	169.022,2	90.056,0	111.814,9	112.449,0
2. Gas Alam	32.940,7	31.179,2	42.594,7	35.696,0	40.918,3	43.561,0
ii. Nonmigas	9.387,7	8.108,9	12.846,0	13.207,3	16.092,3	16.860,7
1. Pertambangan Umum	6.781,4	5.877,9	9.511,3	10.369,4	12.646,8	13.773,2
2. Kehutanan	2.409,5	2.114,8	2.315,5	2.345,4	3.009,7	2.754,5
3. Perikanan	196,9	116,3	77,8	92,0	92,0	100,0
4. Pertambangan Panas Bumi	-	-	941,4	400,4	343,8	233,1
b. Bagian laba BUMN	21.450,6	23.222,5	29.088,4	26.049,5	30.096,9	27.590,0
c. PNBP lainnya	38.025,7	56.873,4	63.319,0	53.796,1	59.428,6	54.398,3
d. Pendapatan BLU	-	2.131,2	3.734,3	8.369,5	10.590,8	17.861,1
II. Hibah	1.834,1	1.697,8	2.304,0	1.666,6	3.023,0	825,1
Pendapatan Negara dan Hibah	637.987,2	707.806,2	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.292.877,7

Sumber: Departemen Keuangan RI⁵

2. Anggaran Belanja Indonesia

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan untuk daerah. Penganggaran dalam organisasi pemerintah

⁵http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2012_rev1.pdf | Kamis, Tanggal 11 Juli 2013

berarti proses pengalokasian sumber-sumber keuangan negara yang terbatas untuk digunakan sebagai pengeluaran kepada setiap unit-unit pemerintahan. Di Indonesia anggaran belanja meliputi: *pertama*, belanja pegawai (gaji dan tunjangan, honorarium dan vakasi kontribusi sosial). *Kedua*, belanja barang. *Ketiga*, belanja modal. *Keempat*, pembayaran bunga hutang (utang dalam negeri dan utang luar negeri). *Kelima*, subsidi (energi dan non energi). *Keenam*, belanja hibah. *Ketujuh*, bantuan sosial (penanggulangan bencana dan bantuan melalui K/L). *kedelapan*, belanja lain-lain (*policy measures*, belanja lainnya dan penyesuaian dana pendidikan).⁶ Adapun data perkembangan belanja Negara tahun 200-2011 sebagai berikut:

⁶http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2012_rev1.pdf | Kamis, Tanggal 11 Juli 2013

Tabel 2.3
Data Belanja Negara Tahun 2006 – 2011
(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P
1. Belanja Pegawai	73.252,3	90.425,0	11.829,9	127.669,7	148.078,1	182.874,9
a. Gaji dan Tunjangan	43.067,9	50.343,5	67.760,7	70.653,7	80.990,3	89.736,8
b. Honorarium dan Vakasi	6.426,2	11.531,7	7.765,9	8.496,0	14.334,3	31.024,9
c. Kontribusi Sosial	23.758,3	28.549,8	37.303,3	48.520,0	52.753,5	62.113,3
2. Belanja Barang	47.181,9	54.511,4	55.963,5	80.667,9	97.596,8	142.825,9
3. Belanja Modal	54.951,9	64.288,7	72.772,5	75.870,8	80.287,1	140.952,5
4. Pembayaran Bunga Utang	79.082,6	79.806,4	88.429,5	93.782,1	88.383,2	106.583,8
a. Utang dalam Negeri	54.908,3	54.079,4	59.887,0	63.755,9	61.480,6	76.613,7
b. Utang Luar Negeri	24.174,3	25.727,0	28.542,8	30.026,2	26.902,7	29.970,1
5. Subsidi	107.431,8	150.214,5	275.291,4	138.082,2	192.707,1	237.194,7
a. Energi	94.605,4	116.865,9	223.013,2	94.585,9	139.952,9	195.288,7
b. Non Energi	12.826,4	33.348,6	52.278,2	43.496,3	52.754,1	41.906,0
6. Belanja Hibah	-	-	-	-	70,0	404,9
7. Bantuan Sosial	40.708,6	49.756,3	57.740,8	73.813,6	68.611,1	81.810,4
a. Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	4.000,0
b. Bantuan melalui K/L	40.708,6	49.756,3	57.740,8	73.813,6	68.611,1	77.810,4
8. Belanja Lain-lain	37.423,1	15.621,2	30.328,1	38.926,2	21.673,0	15.596,2
a. Policy Measures	-	-	-	-	-	4.718,7
b. Belanja Lainnya	37.423,1	15.621,2	30.328,1	38.926,2	21.673,0	10.877,4
c. Penyesuaian dana Pendidikan	-	-	-	-	-	-
Total	440.032,1	504.623,4	693.356,0	628.812,4	697.406,4	908.243,4

Sumber: Departemen Keuangan RI⁷

3. APBN Bermasalah

RAPBN tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 1.202 Triliun. Angka itu hampir tiga kali lipat dari tahun 2004. Dari sisi PDB Indonesia tahun 2011 diperkirakan lebih dari Rp 6.800 Triliun. Dengan jumlah penduduk sebanyak 237,6 juta jiwa maka pendapatan perkapita penduduk Indonesia sekitar Rp 28 juta atau US\$ 3100 pertahun. Angka ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin yang makin

⁷http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/11-08-22,%20DataPokokIndonesia2006-2012_rev1.pdf | Kamis, Tanggal 11 Juli 2013

bertambah tiap tahunnya. Tahun 2010 13,3 % penduduk miskin atau sekitar 31 juta jiwa dengan standar pendapatan kurang dari 1 dolar perhari. Meskipun anggaran terus meningkat, pelayanan negara terhadap rakyat makin buruk, korupsi makin meningkat dan rakyat makin menderita dengan angka kemiskinan yang makin bertambah. Berdasarkan standar bank dunia, 50% penduduk Indonesia yaitu diatas 100 juta, tergolong miskin.

APBN Indonesia tidak pro rakyat/bermasalah, indikasinya *Pertama*, sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak yang diambil dari rakyat sebesar Rp 839 Triliun sekitar 70%. Selain dari pajak, sumber pendapatan lainnya yaitu diperoleh dari utang sebesar 122,5 Triliun sekitar 10%. Di sisi lain kekayaan alam Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke, mempunyai sumber-sumber alam yang sangat melimpah, depositnya banyak. *Kedua*, dari sisi pengeluaran, APBN selalu dibebani dengan pembayaran hutang luar negeri. Tahun 2011 hutang pokok hutang ditambah dengan cicilan bunga hutang mencapai Rp 240 Triliun atau sekitar 25% dari APBN.

B. Utang

1. Teori Utang

Pada hakikatnya, hampir seluruh negara di dunia memanfaatkan sumber pembiayaan utang. Negara-negara industri telah sampai ke tingkat perekonomian seperti yang mereka capai saat ini dengan memanfaatkan utang sebagai sumber yang penting bagi pembiayaan pembangunan mereka. Demikian juga dengan negara-negara berkembang, sebagian besar menggunakan sumber daya pinjaman

tersebut untuk mempercepat upaya pembangunan mereka. Sebagian berhasil mencapai taraf pembangunan yang lebih tinggi, namun sebagian lagi justru masuk dalam perangkap utang.

Pengalaman negara-negara industri dalam menyikapi masalah utang pemerintahnya, terutama Amerika Serikat yang lebih dari 200 tahun terakhir membiayai perekonomiannya dengan banyak mengandalkan sumber pembiayaan yang berasal dari utang, penggunaan utang untuk pembangunan Negara tersebut bukanlah sesuatu yang buruk. Yang perlu dicegah adalah sikap untuk menggunakan utang secara berlebihan, sehingga membawa dampak pada beratnya beban untuk pelunasan kembali.⁸

Di Indonesia, pinjaman luar negeri atau sering disebut dengan utang telah berlangsung lama sekali. Bahkan pada zaman pemerintahan presiden yang pertamapun, pinjaman luar negeri tersebut sudah mulai menumpuk, sampai terjadinya pergantian pemerintahan. Pinjaman lama tersebut banyak terkait dengan penggunaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan persediaan pangan, pembiayaan *konfrontasi* maupun penyelenggaraan pesta olahraga dan konferensi yang sebagian besar dibiayai oleh Blok Timur. Utang luar negeri pada akhirnya menjadi beban yang sangat berat jika diukur dengan kemampuan negara untuk membayarnya kembali, baik dari sisi keuangan negara maupun penyediaan devisanya.

⁸ Cyrillus Harinowo, *Hutang Pemerintah*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002). h.XI

Utang luar negeri telah banyak memberikan hasil bagi pembangunan Negara. Pembangunan berbagai proyek prasarana seperti bendungan, irigasi, listrik, telepon, jembatan, jalan, sarana transportasi darat, laut dan udara, dan banyak lagi yang lainnya. Dilakukan secara berkesinambungan sehingga Indonesia pada akhirnya mencapai tingkat penghasilan perkapita yang meningkat berkali-kali lipat. Indonesia bahkan sempat menjadi salah satu contoh keajaiban ekonomi dunia.

Namun, meskipun utang bisa memberikan kontribusi yang banyak, ternyata utang bisa menimbulkan masalah. Tapi sekarang ini justru utang menjadi instrumen keuangan yang paling menarik. Utang sudah menjadi gaya hidup suatu negara. Utang bukan lagi untuk menutupi ketekoran anggaran, tapi bagian dari anggaran itu sendiri. Utang atau sering disebut dengan *leverage* adalah meminjam uang untuk digunakan dalam investasi sekuritas yang beresiko. Positifnya, *leverage* bisa meningkatkan keuntungan secara berlipat, sebaliknya, negatifnya ia juga bisa menggandakan kerugian. Krisis yang terjadi tahun 2007-2008, tidak lepas dari permainan *leverage*.⁹

2. Utang Luar Negeri Pemerintah

Tidak semua negara yang digolongkan dalam kelompok negara dunia ketiga, atau negara yang sedang berkembang, merupakan negara miskin, dalam arti tidak memiliki sumberdaya ekonomi. Banyak negara dunia ketiga yang justru

⁹ M. Luthfi Hamidi, *Quranomics: The Crisis, Krisis Manalagi yang Engkau Dustakan?*, (Jakarta; Republika, 2012). h.61

memiliki kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Masalahnya adalah kelimpahan sumberdaya alam tersebut masih bersifat potensial, artinya belum diambil dan didayagunakan secara optimal. Sedangkan sumberdaya manusianya yang besar, belum sepenuhnya dipersiapkan, dalam arti pendidikan dan ketrampilannya, untuk mampu menjadi pelaku pembangunan yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Pada kondisi yang seperti itu, maka sangatlah dibutuhkan adanya sumberdaya modal yang dapat digunakan sebagai katalisator pembangunan, agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik, lebih cepat, dan berkelanjutan. Dengan adanya sumberdaya modal, maka semua potensi kelimpahan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dimungkinkan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan.

Tetapi, pada banyak negara yang sedang berkembang, ketidakterersediaan sumberdaya modal seringkali menjadi kendala utama. Dalam beberapa hal, kendala tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pemobilisasian modal di dalam negeri. Beberapa penyebabnya antara lain: (1) pendapatan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah, menyebabkan tingkat MPS (*marginal propensity to save*) rendah, dan pendapatan pemerintah dari sektor pajak, khususnya penghasilan, juga rendah. (2) Lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat, yang memang terbatas itu, tidak dapat didayagunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan usaha yang produktif. (3) Kurang berkembangnya pasar modal, menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, sehingga banyak perusahaan yang

kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Dengan kondisi sumberdaya modal domestik yang sangat terbatas seperti itu, jelas tidak dapat diandalkan untuk mampu mendukung tingkat pertumbuhan output nasional yang tinggi seperti yang diharapkan. Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri, yang umumnya dalam bentuk hibah (*grant*), bantuan pembangunan (*official development assistance*), kredit ekspor, dan arus modal swasta, seperti bantuan bilateral dan multilateral; investasi swasta langsung (PMA); portfolio investment; pinjaman bank dan pinjaman komersial lainnya; dan kredit perdagangan (ekspor/impor). Modal asing ini dapat diberikan baik kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta. Banyak pemerintah di negara dunia ketiga menginginkan untuk mendapatkan modal asing dalam menunjang pembangunan nasionalnya, tetapi tidak semua berhasil mendapatkannya, kalau pun berhasil jumlah yang didapat akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor antara lain (ML. Jhingan : 1983, halaman 643-646):

- a. Ketersediaan dana dari negara kreditur yang umumnya adalah negara-negara industri maju.
- b. Daya serap negara penerima (debitur). Artinya, negara debitur akan mendapat bantuan modal asing sebanyak yang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang bermanfaat. Daya serap mencakup kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan, mengubah

struktur perekonomian, dan mengalokasikan kembali resources. Struktur perekonomian yang simultan dengan pendayagunaan kapasitas nasional yang ada akan menjadi landasan penting bagi daya serap suatu negara.

- c. Ketersediaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia di negara penerima, karena tanpa ketersediaan yang cukup dari kedua sumberdaya tersebut dapat menghambat pemanfaatan modal asing secara efektif.
- d. Kemampuan negara penerima bantuan untuk membayar kembali (*re-payment*).
- e. Kemauan dan usaha negara penerima untuk membangun. Modal yang diterima dari luar negeri tidak dengan sendirinya memberikan hasil, kecuali jika disertai dengan usaha untuk memanfaatkan dengan benar oleh negara penerima. Sebagaimana dikatakan Nurkse (1961: 83), bahwa modal sebenarnya dibuat di dalam negeri. Sehingga, peranan modal asing sebenarnya adalah sebagai sarana efektif untuk memobilisasi keinginan suatu negara.

Sekarang ini dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, termasuk dalam bidang finansial, menyebabkan arus modal asing semakin leluasa keluar masuk suatu negara. Pada banyak negara yang sedang berkembang, modal asing seolah-olah telah menjadi salah satu modal pembangunan yang diandalkan. Bahkan, beberapa negara saling berlomba untuk dapat menarik modal asing sebanyak-banyaknya dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang menguntungkan bagi para investor dan kreditur. Khusus modal asing dalam bentuk pinjaman luar negeri kepada pemerintah, baik yang bersifat *grant*; *soft*

loan; maupun *hard loan*, telah mengisi sektor penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (*government budget*) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan negara atau investasi pemerintah di sektor publik. Dengan mengingat bahwa peran pemerintah yang masih menjadi penggerak utama perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang, menyebabkan pemerintah membutuhkan banyak modal untuk membangun berbagai prasarana dan sarana, sayangnya kemampuan finansial yang dimiliki pemerintah masih terbatas atau kurang mendukung. Dengan demikian, maka pinjaman (utang) luar negeri pemerintah menjadi hal yang sangat berarti sebagai modal bagi pembiayaan pembangunan perekonomian nasional. Bahkan dapat dikatakan, bahwa utang luar negeri telah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan perekonomian nasional yang cukup penting bagi sebagian besar negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia.¹⁰

3. Alasan Pemerintah Mengambil Utang

Pemerintah tidak dengan tanpa alasan mengambil utang: *pertama*, sebagai jalan keluar untuk menutupi defisit dalam rangka pembiayaan defisit anggaran. Ada kalanya penerimaan yang kita dapatkan dari berbagai sumber yaitu pajak, PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan hibah luar negeri dianggap kurang memadai dibandingkan dengan pos pengeluaran yang kita lakukan. Sementara

¹⁰ <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15669/15661> | Selasa, Tanggal 19 Agustus 2014

pos pengeluaran yang dianggarkan pemerintah semuanya dianggap penting sehingga tidak bisa dihilangkan. Dalam berbagai kasus di berbagai Negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia, utang digunakan sebagai instrument untuk pertumbuhan ekonomi. Ada kalanya pembangunan infrastruktur yang ada tidak memadai, sementara anggaran yang ada tidak mencukupi. Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Dengan infrastruktur yang baik, dapat mendorong kepercayaan investor dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi dalam negeri. Investasi yang ada akan menyerap banyak sekali lapangan pekerjaan. Semakin banyak orang yang mampu bekerja akan meningkatkan kesejahteraannya dan tentu saja meningkatkan Pendapatan Nasional. Inilah efek domino yang ditimbulkan jika infrastruktur kita baik.

Kedua, ada kalanya sumber daya dalam negeri, dalam hal ini uang yang ada di Bank tidak mencukupi untuk kebutuhan investasi masyarakat. Sehingga dalam rangka pencukupan sumber daya tersebut pemerintah perlu berhutang agar tersedia dana yang cukup bagi masyarakat yang ingin berinvestasi. Seperti dijelaskan di atas bahwa investasi yang baik akan banyak menyerap lapangan pekerjaan dan menimbulkan efek domino yang positif lainnya.

Berikut data perkembangan utang pemerintah Indonesia:

Tabel 2.4
Data Perkembangan Utang Pemerintah Indonesia
Tahun 2006 – 2011
(Angka Dalam Miliar Rupiah)

No	Kelompok Peminjam	Tahun					
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Pemerintah dan Bank Central	75,820	80,615	86,600	99,265	118,624	872.2
	Pemerintah/ <i>Government</i>	73,055	76,920	85,136	90,853	106,860	799.692
	Bank Central/ <i>Central Bank</i>	2,765	3,695	1,465	8,412	11,764	72.507
2	Swasta	56,813	60,565	68,480	73,606	83,789	703.847
	Bank	8,459	9,934	11,583	9,530	14,382	122.935
	Bukan Bank	48,354	50,631	56,897	64,075	69,407	580.914
	LKBB/ <i>Non Bank Financial Corporations</i>	2,017	2,114	3,891	3,066	3,575	41.749
	Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan/ <i>Non Financial Corporations</i>	46,337	48,517	53,005	61,009	65,833	539.163
Total		132.633	141.180	155.080	172.871	202.413	2156.96

Sumber : Bank Indonesia¹¹

C. Pandangan Islam Tentang APBN dan Utang

1. APBN dalam Sistem Islam

Islam adalah Agama yang sempurna, Agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti ibadah *mahdhah* (shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain). Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti aturan seputar tatacara berpakaian dan seputar makanan, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan yang lain yang biasa disebut dengan *muamalah* seperti aturan tentang jual beli, pendidikan,

¹¹<http://www.google.com/search?hl=en&q=data+utang+luar+negeri+indonesia&gbv=2&nfpr=&spell=1&sa=X&ei=Z0feUcnfEOekigeo7YHwBg&ved=0CBcQvwU> | Kamis, Tanggal 11 Juli 2013

kesehatan termasuk politik didalamnya. Politik dalam pandangan Islam adalah *Riayatu Syu'unil Ummah* yaitu mengurus urusan umat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan umat dikatakan politik, termasuk dalam mengatur APBN ini. bagaimana jika APBN dibuat dengan wajah Syariah? Dari sisi penerimaan apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN? Lalu dari sisi pengeluaran apakah pembayaran pokok dan cicilan utang akan terus mendominasi disamping pos subsidi?

Untuk mendapat jawaban tersebut, Islam mempunyai solusi untuk memecahkan permasalahan APBN di Indonesia. Dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di Indonesia.

2. Pendapatan Negara Islam

Pos penerimaan disusun berdasarkan pos-pos yang ditetapkan syariah. Dalam kitab *Al-Amwal Fi ad-Dawlah al-Khilafah* Abdul Qadim Zallum menyatakan bahwa pos pendapatan Negara terdiri dari tiga bagian:

a. Bagian *Fa'I* dan *Kharaj*, penerimaan ini meliputi:

1) Seksi *Ghanimah*, mencakup *Anfal*, *Fa'I* dan *Khumus*

Ibnu Abbas dan Mujahid telah dimintai pendapat tentang *anfal* dalam firman Allah SWT. “*mereka akan bertanya kepadamu tentang anfal*” (TQS. Al-anfal:1). Keduanya berpendapat bahwa *anfal* itu adalah *Ghanimah*. Yang dimaksud dengan *anfal* yang telah dikuasai oleh seorang imam, adalah segala sesuatu yang dikuasakan kepadanya dari harta orang kafir, melalui peperangan di medan perang. Karena itu

anfal dan *ghanimah* adalah sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum Muslim dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lain-lain.

2) Seksi *Kharaj*

Kharaj adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *ghanimah*) dari orang kafir. Baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Ada *Kharaj 'Unwah* (*karaj* paksaan) dan *Kharaj Sulhi* (*kharaj* damai).

3) Seksi Status Tanah

Seksi status tanah ini adalah bagian yang mengurus tanah mencakup tanah-tanah yang dibebaskan secara paksa (*'unwah*), tanah *'usyriyah*, *as-shawafi*, tanah-tanah yang dimiliki negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah terlarang (yang dipagari)

4) Seksi *Jizyah*

Jizyah adalah hak yang diberikan Allah kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan *jizyah*, maka wajib bagi kaum Muslim untuk melindungi jiwa dan harta mereka.

5) Seksi *fa'i*

Fa'I adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan.

6) Seksi pajak (*dhoribah*)

Pajak adalah harta yang menjadi milik negara apabila kas negara kosong sama sekali. Ketika tidak dipungut pajak maka akan menimbulkan darurat. Sebaliknya jika masih ada kas negara, maka negara dilarang memungut pajak dari rakyat. sebagaimana hadits Nabi SAW.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ افْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ أَيَّامَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رواه مسلم)

dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail RA.katanya Rasulullah SAW. Bersabda: "Siapa yang merampas tanah orang lain dengan cara Dzalim walaupun hanya sejengkal, maka Allah akan mengalunginya kelak dihari kiamat dengan tujuh lapis bumi." (H.R. Muslim)¹²

Selain itu, ada hadits-hadits yang menunjukkan dengan jelas keharaman menarik pajak dan sejenisnya Rasulullah SAW. Di dalam sebuah riwayat bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بَرِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

¹² Imam Muslim, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim Jilid I,II,III,IV*. (Kuala Lumpur: Klang Book Center, 2007), h. 191.

شَمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ مَكْسٍ." (رواه أبو داود)

Telah berkata Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishak dari Baridah bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Samasah dari 'Uqbah bin Amir berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak akan masuk Surga orang yang memungut cukai." (H.R. Abu Dawud)¹³

b. Bagian kepemilikan umum, yaitu harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Syari' (Allah dan Rasulnya) bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut. namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.

- 1) Seksi minyak dan gas
- 2) Seksi listrik
- 3) Seksi pertambangan
- 4) Seksi laut, sungai, perairan dan mata air
- 5) Seksi hutan dan padang rumput
- 6) Seksi asset produktif yang dikuasai negara, misalnya yang berasal dari wakaf

¹³H.R. Abu Dawud

Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada rakyat, baik berupa harta yang dibagikan langsung maupun berupa pelayanan negara yang dibiayai dari penjualannya, baik dalam negeri maupun ekspor

c. Bagian sedekah, yang terdiri dari sedekah wajib, yaitu;

- 1) Zakat harta dan perdagangan berupa uang (emas/perak)
- 2) Zakat pertanian dan buah-buahan
- 3) Zakat ternak

Untuk Indonesia, dari ketiga bagian ini, harta yang paling dapat diandalkan untuk APBN adalah kepemilikan umum. Sebagaimana yang tercantum dalam Hadits Nabi SAW.

النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim itu berserikat dalam tig hal, yaitu air, padang rumput dan api. (HR. Abu Daud)¹⁴

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW. Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“Sesungguhnya Nabi saw melarang menjual kelebihan air.” (HR Lima kecuali Ibn Majah dan disahihkan al-Tirmidziy)¹⁵

Pada pos inilah dilakukan beberapa perhitungan dengan sejumlah asumsi, yang antara lain bergantung pada harga minyak dunia dan nilai mata uang dunia.¹⁶

¹⁴ Abdul Qadim Zallum. *Sistem Keuangan Negara Khilafah Cet. I.* (Jakarta Selatan:2009) h. 86

¹⁵ <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/02/08/pembatasan-bbm-bersubsidi-atau-kenaikan-bbm-kebijakan-khianat-dan-dzalim-terhadap-rakyat/> | Tanggal 10 Oktober 2014

Data aktual, berdasarkan kondisi saat ini, kita temukan sejumlah data yang diperlukan untuk menghitung besaran angka APBN antara lain, bisa diketahui sebagai berikut:

1. Pertambangan, migas, batubara dan listrik

- 1) Produksi minyak di Indonesia saat ini sekitar 950.000 barrel perhari (bpd). Bila asumsi harga minyak adalah US\$ 65/barrel dan nilai tukar rupiah Rp 9000/US\$ maka nilai minyak ini hanya sekitar Rp 202 Triliun. Bila biaya produksi dan distribusi minyak ditaksir hanya berkisar 10% dari nilai tersebut, maka *nett profit*-nya masih diatas Rp 182 Triliun. Namun keuntungan ini hanya tercapai bila seluruh hasil minyak dijual dengan harga pasar (tanpa subsidi yakni US\$ 72/barrel) dan baru hasilnya yang dikembalikan kepada rakyat melalui baitul mal. Saat ini Indonesia bahkan harus menjadi *net-importer* minyak, karena kebutuhan minyak perhari 1,2 juta barrel, akibat politik energi saat ini yang selalu tertumpu pada minyak, termasuk lambatnya pembangunan jaringan kereta api berikut elektrifikasinya..
- 2) Produksi gas (LNG) adalah setara sekitar 5,6 juta barrel minyak perhari, namun harga dipasar dunia hanya 25% harga minyak, jadi nilainya sekitar Rp 297 Triliun atau *nett profit*-nya sekitar Rp 268 Triliun.

¹⁶ Fahmi Amhar. *Meramu APBN Syari'ah*. Majalah Al-Wa'ie Edisi 122 (Oktober 2010) h. 14

- 3) Produksi batubara adalah setara 2 juta barrel minyak perhari, dengan harga dipasar dunia sekitar 50% harga minyak, jadi nilainya sekitar 212 Triliun, atau *nett profit*-nya sekitar Rp 191 Triliun.
- 4) Produksi listrik tidak signifikan kecuali bila dilakukan pembangkitan listrik dari energi terbarukan (air, angin dan geothermal) atau nuklir. Energi listrik seperti ini biasanya impas dikonsumsi sendiri. Indonesia, karena tidak ada integrasi antara Pertamina, PGN, PT. Batubara Bukit Asam dan PLN maka PLN rugi puluhan Triliun.
- 5) Produksi pertambangan terutama emas seperti Freeport atau Newmont hanya dapat ditaksir dari setoran pajak yang jumlahnya sangat tinggi, bila kita percaya kebenaran nilai pajak Freeport yang Rp 6 Triliun setahun, dan ini baru 20% dari *nett profit*, itu artinya *nett profit* nya adalah Rp 30 Triliun pertahun. Ini masuk akal karena dari sumber lain didapat informasi bahwa produksi emas di Freeport adalah sekitar 200 Ton emas murni perhari. Bersama perusahaan tambang mineral logam lainnya, yakni emas/Newmont juga timah, bauxit, bensin juga kapur, pasir dan lain-lain *nett profit* sektor pertambangan adalah minimal Rp 50 Triliun pertahun. Sektor pertambangan minyak, gas, batubara dan mineral logam didapat penerimaan sekitar Rp 691 Triliun.

2. Kelautan

Produksi laut sifatnya bebas dilakukan oleh nelayan swasta baik kecil maupun besar, tentu sulit untuk memasukannya sebagai penerimaan Negara.

Menurut Rokhmin Dahuri, nilai potensi lestari laut Indonesia baik hayati, non hayati, maupun wisata adalah sekitar US\$ 82 Milyar atau Rp 738 Triliun. Bila ada BUMN kelautan yang ikut bermain disini dengan ceruk 10%, maka ini sudah sekitar RP 73 Triliun.

3. Kehutanan

Luas hutan Indonesia adalah 100 juta hektar, dan untuk mempertahankan agar lestari dengan siklus 20 tahun, maka setiap tahun hanya 5% tanaman yang di ambil. Bila dalam 1 hektar hutan, hitungan minimalisnya ada 400 pohon, setiap tahun hanya 20 pohon perhektar yang ditebang. jika kayu pohon berusia 20 tahun, itu nilai pasarnya Rp 2 Juta dan *nett profitnya* Rp 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan kita adalah 100 juta hektar x 20 pohon perhektar x 1 juta perpohon = Rp 2000 Triliun jumlah ini tidak termasuk hutan yang dirusak oleh *illegal logging*.¹⁷

3. Pos Pengeluaran Negara Islam

Menghitung pos pengeluaran digunakan rasio-rasio ideal berdasarkan data wilayah dan kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah, serta harga pasar rata-rata saat ini. Dalam kitab *Nizham al-iqtishadi fi al-Islam* karya Taqiyyudin an-Nabhani dinyatakan bahwa pengeluaran kas Negara (*Baitul Mal*) ditetapkan berdasarkan enam kaidah:

- a. Harta yang menjadi kas tersendiri Baitul Mal, yaitu harta zakat. Harta ini hanya dibelanjakan untuk delapan *Ashnaf*, jika kasnya terisi. Bila di *Baitul*

¹⁷Kartikasari. *op.cit.h.*,132

Mal harta zakat habis, maka tidak ada seorangpun dari delapan *ashnaf* itu yang berhak mendapatkannya, dan tidak akan dicarikan pinjaman untuk itu.

- b. Pembelanjaan yang sifatnya wajib, yaitu manakala terjadi kekurangan (fakir miskin atau ibnu sabil) atau untuk melaksanakan jihad. Ini bersifat pasti, bila tidak ada dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan maka Negara dapat meminjam harta dan setelah itu dilunasi, dan bila perlu dapat menarik pajak.
- c. Pembelanjaan yang sifatnya kompensasi, yakni bagi orang-orang yang telah memberikan jasa, misalnya gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, guru dan sebagainya, ini juga bersifat pasti.
- d. Pembelanjaan karena unsur keterpaksaan, semisal ada bencana alam atau serangan musuh. Ini juga bersifat pasti.
- e. Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan, bukan untuk kompensasi, namun sifatnya vital, karena bila tidak ada, umat akan mengalami kesulitan, seperti pembangunan infrastruktur. Ini juga bersifat pasti.
- f. Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan, hanya saja bila tidak ada, umat tidak sampai menderita, misalnya pembangunan fasilitas hiburan, atau adanya fasilitas umum sekunder ketika fasilitas lama masih memadai.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hal.14

4. Kondisi yang mengharuskan Negara melakukan Utang menurut Pandangan Islam

Negara boleh melakukan utang (pinjaman) dalam hal jika hal ini akan menimbulkan mudharat, kerusakan atau kehancuran. Baik terhadap Negara maupun rakyatnya. Biasanya ini terjadi dalam tiga keadaan, *pertama*, ketika terjadi bencana alam, sementara di *Baitul Mal* tidak ada dana. Yang jika ditanggihkan akan menyebabkan terjadinya mudharat, kerusakan dan kehancuran. *Kedua*, membiayai untuk fakir, miskin, *Ibn Sabil* dan jihad. Jika ada dana Zakat di *Baitul Mal*, maka dana bisa digunakan untuk membiayainya, tetapi jika tidak ada, dimana jika ditanggihkan akan menimbulkan *mudharat*, kerusakan dan kehancuran. *Ketiga*, pembayaran gaji Negara, guru, hakim dan orang-orang yang banyak memberikan jasanya kepada Negara¹⁹.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa mahasiswa/i dari berbagai jurusan, diantaranya adalah:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Wiwin Haerani	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Defisit APBN di	Membahas APBN yaitu Defisit APBN dan dalam	Pengaruh nilai tukar riil, harga minyak dunia, tingkat inflasi, dan suku bunga riil terhadap defisit

¹⁹*Ibid*, hal. 103

		Indonesia Periode Tahun 2001-2010	penelitian ini posisi APBN adalah sebagai variabel Y yaitu variabel terikat	APBN di Indonesia. Sedangkan penelitian saya adalah tentang seberapa besar pengaruh utang luar negeri pemerintah terhadap APBN dan bagaimana Islam mengatur APBN
2	Harun Rosit	Analisis Kausalitas Asumsi APBN Terhadap APBN di Indonesia	Membahas APBN yaitu asumsi APBN dan dalam penelitian ini posisi APBN adalah sebagai variabel Y, yaitu variabel terikat	Penelitian yang dilakukan oleh Harun Rosit meneliti tentang Asumsi APBN yaitu kontribusi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, harga minyak internasional dan produksi minyak Indonesia terhadap APBN di Indonesia. Sedangkan penelitian saya adalah tentang seberapa besar pengaruh utang luar negeri pemerintah terhadap APBN dan bagaimana Islam mengatur APBN

E. Hipotesis

1. Merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan
2. Dirumuskan dalam kalimat pertanyaan bukan kalimat Tanya

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja suatu variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat dibedakan dalam hipotesis deskriptif, hipotesis argumentatif, hipotesis kerja dan hipotesis statistik atau hipotesis nol. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara x

dan y . penulis menggunakan analisis regresi sederhana. Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut:

Diduga :

H_0 : Utang Pemerintah (x) tidak berpengaruh signifikan terhadap APBN (y)

H_a : Utang Pemerintah (x) berpengaruh signifikan terhadap APBN (y)